

PENGELOLAAN DEPOT AIR MINUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Devriyanti Akili¹, Robin Pakudu², Rifka S. Akibu³, Rusly Abdurrahman
Idji⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
E-mail: devriyantiakili1979@gmail.com

Submit:

Review:

Publish:

Abstract : *This study aims to describe the management of drinking water depots in increasing Locally Generated Revenue (PAD) at the Bone Bolango Regency Health Office. This study used a qualitative approach with a descriptive approach. Data sources were obtained through interviews, observations, and documentation with informants including the Head of the Laboratory, the Head of Administration, the treasurer, the billing officer, administrative staff, and the owner of the drinking water depot. The results indicate that the management of the drinking water depots has been carried out through the stages of planning, organizing, implementing, and monitoring. Planning is based on operational needs and previous evaluations, while organization is evident in the division of tasks and coordination among employees. Water quality testing services have been carried out according to SOPs, but challenges remain, including limited facilities and budget. Supervision is carried out through monitoring administration, test result quality, and levy payments. Good management is expected to improve service quality and contribute to increasing Locally Generated Revenue (PAD) in Bone Bolango Regency.*

Keyword : *management, drinking water depots, Locally Generated Revenue (PAD), public services, supervision.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan depot air minum dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Laboratorium, Kepala Tata Usaha, bendahara, petugas penagihan, staf administrasi, serta pemilik depot air minum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan depot air minum telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan evaluasi sebelumnya, sedangkan pengorganisasian terlihat dari pembagian tugas dan koordinasi antarpegawai. Pelaksanaan pelayanan pengujian kualitas air telah berjalan sesuai SOP, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

sarana dan anggaran. Pengawasan dilakukan melalui monitoring administrasi, mutu hasil uji, dan pembayaran retribusi. Pengelolaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango

Kata Kunci : pengelolaan, depot air minum, PAD, pelayanan publik, pengawasan.

Citation :

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kualitas pelayanan publik sering dijadikan indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kewenangan tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kesehatan, serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya daerah sehingga kualitas pelayanan publik di setiap daerah belum merata.

Sektor kesehatan menjadi salah satu pelayanan publik yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat dari keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga dari kemudahan akses, kualitas pelayanan, serta kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan tersebut. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan terjangkau, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Dalam kenyataannya, aksesibilitas pelayanan kesehatan di beberapa daerah masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor geografis, ekonomi, maupun keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi sumber pembiayaan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan, meningkatkan jumlah tenaga medis, serta memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebaliknya, rendahnya PAD dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat sehingga ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pelayanan menjadi terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh PAD terhadap pembangunan daerah dan kinerja pemerintah daerah secara umum, sedangkan penelitian mengenai keterkaitan PAD dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan di tingkat daerah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan keuangan daerah tanpa melihat dampaknya secara langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan peningkatan PAD dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan masih perlu dikaji lebih mendalam, khususnya

pada konteks daerah yang sedang mengembangkan inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini tidak hanya melihat PAD sebagai indikator kemampuan keuangan daerah, tetapi juga menganalisis sejauh mana peningkatan PAD berdampak terhadap kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi “Klik PAD”, sebagai bagian dari inovasi pengelolaan pendapatan daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango serta sejauh mana peningkatan PAD mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah terhadap aksesibilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bone Bolango serta mengetahui dampaknya terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik pada sektor kesehatan di Kabupaten Bone Bolango. Menurut John W. Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks alamiah sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi, pengalaman, dan perspektif informan. Melalui penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara rinci kondisi pelayanan publik kesehatan serta keterkaitannya dengan peningkatan PAD di Kabupaten Bone Bolango.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (key instrument). Kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi pelayanan kesehatan dan pengelolaan PAD, sekaligus melakukan interaksi dengan informan untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, validitas data sangat bergantung pada kemampuan, kepekaan, dan integritas peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai September 2025 sampai November 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pegawai yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan PAD dan pelayanan kesehatan, serta masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen, laporan, arsip, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti laporan PAD, kebijakan pelayanan kesehatan, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pengelolaan PAD di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan, pengelolaan PAD, serta berbagai hambatan yang dihadapi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, kebijakan pemerintah daerah, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan kondensasi data dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan penelitian. Data yang telah dikondensasikan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan proses analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan hasil observasi. Selain itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi data yang diperoleh. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

Tahap penelitian dalam penelitian ini terdiri atas tahap orientasi, tahap eksplorasi, tahap pengumpulan data, tahap pengecekan data, serta tahap pengolahan dan analisis data. Pada tahap orientasi, peneliti melakukan pengamatan awal dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Tahap eksplorasi dilakukan dengan pengumpulan data yang lebih terarah sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kredibilitas informasi sebelum dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Planing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator perencanaan (*planning*) dalam pengelolaan depot air minum (DAM) dan laboratorium di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango telah berjalan cukup baik. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui evaluasi penggunaan reagen dan bahan uji pada tahun sebelumnya, pendataan kebutuhan, serta penyesuaian dengan kondisi anggaran yang tersedia. Data yang digunakan dalam perencanaan meliputi jumlah sampel yang diperiksa, frekuensi pengujian, dan stok bahan yang masih tersedia sehingga kebutuhan yang disusun lebih terukur dan sesuai dengan kondisi lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah dilakukan secara terarah dan berbasis kebutuhan aktual organisasi. Hal tersebut sejalan dengan teori George R. Terry yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Terry, 2016). Selain itu, Handoko (2018) menjelaskan bahwa perencanaan yang baik harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. Temuan penelitian ini juga didukung oleh Djafar (2025) yang menjelaskan bahwa perencanaan yang berbasis data dan koordinasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pelayanan publik dan mitigasi risiko organisasi.).

2. Pengorganisasian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian (*organizing*) dalam pengelolaan DAM telah berjalan cukup baik melalui pembagian tugas sesuai fungsi dan kompetensi masing-masing pegawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa analis laboratorium dibagi berdasarkan kemampuan teknis, seperti pemeriksaan parameter fisik, kimia, dan pencatatan hasil uji. Selain itu, pembagian tugas administrasi juga dilakukan secara jelas antara staf administrasi, bendahara, dan petugas penagihan sehingga pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan terarah. Kondisi ini menunjukkan adanya struktur kerja yang sistematis dan koordinasi yang baik antarbagian. Temuan tersebut sesuai dengan teori Henri Fayol tentang *division of work* yang menekankan pentingnya spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi organisasi (Fayol, 1984). George R. Terry juga menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan dan penetapan hubungan kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efektif (Terry, 2016). Dengan adanya koordinasi harian, komunikasi internal, dan penerapan SOP, pengelolaan DAM telah mencerminkan prinsip organisasi modern yang efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2018).

3. Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan (*actuating*) pengujian kualitas air DAM telah berjalan cukup baik sesuai SOP yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pengujian dilakukan setiap hari berdasarkan jadwal penerimaan sampel, mulai dari pemeriksaan parameter fisik dan kimia, pencatatan hasil, verifikasi, hingga pelaporan administrasi. Selain itu,

monitoring penggunaan anggaran dan pengawasan pembayaran retribusi juga dilakukan secara rutin sehingga kegiatan operasional berjalan lebih tertib dan transparan. Pelaksanaan yang berjalan secara teratur menunjukkan bahwa setiap bagian organisasi telah menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing dan didukung komunikasi yang cukup baik antarbagian. Hal ini sesuai dengan teori George R. Terry yang menyatakan bahwa *actuating* merupakan upaya menggerakkan anggota organisasi agar bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan (Terry, 2016). Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Djafar (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh komunikasi, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan tugas organisasi secara efektif

4. Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan (*controlling*) dalam pengelolaan DAM telah berjalan cukup baik melalui pengawasan teknis, administrasi, keuangan, dan retribusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan mutu hasil uji dilakukan melalui pengecekan kalibrasi alat, pemeriksaan kelayakan reagen, verifikasi hasil uji, serta uji duplikasi untuk menjaga akurasi hasil pemeriksaan. Selain itu, pengawasan administrasi dan keuangan dilakukan melalui monitoring dokumen layanan, evaluasi penggunaan anggaran, dan verifikasi transaksi agar penggunaan dana tetap transparan dan akuntabel. Pengawasan terhadap pembayaran retribusi DAM juga dilakukan secara rutin untuk memastikan kewajiban pembayaran dipenuhi tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengendalian telah berjalan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh bagian organisasi. Temuan tersebut sesuai dengan teori George R. Terry yang menyatakan bahwa *controlling* bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar dan rencana yang telah ditetapkan (Terry, 2016). Selain itu, Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pengawasan anggaran sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Hal serupa juga dikemukakan oleh Djafar (2025) yang menyatakan bahwa pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi berkala sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pelayanan dan kualitas pelaksanaan program organisasi.

REFERENSI

- Adi, I. R. (2018). *Manajemen pelayanan publik*. Rajawali Pers.
- Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
<https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Djafar, F. (2025). *Revitalising development administration for environmental disaster risk reduction in Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 15(2), 182–193.
<https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.14329>

- Deming, W. E. (2000). *Out of the crisis*. MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/12274.001.0001>
- Fayol, H. (1984). *General and industrial management*. Pitman Publishing.
<https://doi.org/10.4324/9781315139477>
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. Institute of Public Administration.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2017). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). *Management of organizational behavior* (5th ed.). Prentice-Hall.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Mooney, J. D., & Reiley, A. C. (1939). *On the principles of organization*. Harper & Brothers.
- Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: Definition and relationship to consumer satisfaction. *Medical Care*, 19(2), 127–140.
<https://doi.org/10.1097/00005650-198102000-00001>
- Peters, D. H., Garg, A., Bloom, G., Walker, D. G., Brieger, W. R., & Rahman, M. H. (2008). Poverty and access to health care in developing countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1136, 161–171.
<https://doi.org/10.1196/annals.1425.011>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34759.52649>
- Shah, A. (2007). *Local public financial management*. The World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6932-6>
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Manajemen dan evaluasi kinerja*. FE Universitas Indonesia.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). *Management*. Prentice-Hall.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2016). *Principles of management*. Irwin.
- van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector* (2nd ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315885077>
- World Health Organization. (2010). *Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies*. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/258734>